

PENGARUH PAJAK DAN LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BEKASI 2014 - 2024

Wulandari¹, Herlina Puspa Dewi²

^{1,2}STIE Dharma Agung Indonesia

Email: wulandari24032003@gmail.com¹, puspadharmaagung@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. PAD merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD yang bersumber dari kontribusi masyarakat, sementara laba BUMD berasal dari hasil usaha entitas milik pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi serta laporan laba rugi BUMD periode tahun 2020 hingga 2024. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bekasi. Laba BUMD juga memiliki pengaruh positif terhadap PAD, meskipun kontribusinya secara nominal masih tergolong rendah dibandingkan pajak daerah. Secara simultan, pajak daerah dan laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan kinerja serta efisiensi BUMD menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendapatan daerah dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Laba BUMD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Bekasi, Regresi Linier Berganda.

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of regional taxes and profits of Regionally-Owned Enterprises (BUMD) on the Regional Original Income (PAD) of Bekasi Regency. PAD is an important indicator in measuring the fiscal independence of a region, which reflects the region's ability to finance development and public services without relying entirely on transfer funds from the central government. Regional taxes are one of the main components of PAD sourced from community contributions, while BUMD profits come from the business results of regional government-owned entities. The research method used is a quantitative approach with an associative method. The data used are secondary data taken from the budget realization report and financial statements of the Bekasi Regency Government as well as the profit and loss report of BUMD for the period 2020 to 2024. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis, with partial tests (t-test), simultaneous tests (F-test), and coefficient of determination (R^2). The results of the study indicate that regional taxes significantly

influence Bekasi Regency's Regional Original Revenue (PAD). Regionally-Owned Enterprises (BUMD) profits also have a positive impact on PAD, although their nominal contribution is still relatively low compared to regional taxes. Simultaneously, regional taxes and BUMD profits significantly influence Bekasi Regency's PAD. Therefore, optimizing tax revenue and improving BUMD performance and efficiency are strategic steps in strengthening regional revenue and promoting regional fiscal independence.

Keywords: *Regional Taxes, BUMD Profits, Locally-Owned Revenue (PAD), Bekasi Regency, Multiple Linear Regression.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan melalui kemandirian fiskal. Salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi sumber pendapatan yang menggambarkan sejauh mana daerah mampu mendanai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa sangat bergantung pada dana transfer dari pusat (Rizqiawan, 2020; Anggraini et al., 2021). Dalam konteks ini, Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi ekonomi yang besar baik dari sektor industri, perdagangan, maupun jasa.

Namun, efektivitas dan kontribusi unsur-unsur pembentuk PAD seperti pajak daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih menjadi perhatian (IPDN, 2021; Yuniarti et al., 2023). Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD yang berasal dari masyarakat dalam bentuk iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang (Kanwil DJPb Provinsi Aceh, 2019). Menurut laporan keuangan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2021, total realisasi pendapatan pajak daerah mencapai Rp2.008.212.803.072 atau sekitar 97,23% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sudah cukup efektif, namun realisasi tersebut mengalami sedikit penurunan target yang 1 2 menandakan perlunya penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di masa mendatang (IPDN, 2021). Tren positif dalam perolehan pajak daerah perlu dikaji apakah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PAD secara keseluruhan.

Selanjutnya, kontribusi dari laba BUMD juga tidak dapat dikesampingkan dalam membentuk PAD. Laba BUMD yang disetorkan ke kas daerah merupakan hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah di perusahaan perusahaan milik daerah, seperti PDAM Tirta Bhagasasi, PT Bina Bangun Wibawa Mukti, dan penyertaan modal pada Bank Jabar (Nurmiati et al., 2020). Pada tahun 2021, total realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan yang mencerminkan laba BUMD adalah sebesar Rp18.729.447.485 atau sekitar 92,83% dari target anggaran (IPDN, 2021). Jumlah ini menunjukkan adanya peran nyata dari BUMD dalam menambah pundi pundi keuangan daerah, walaupun nominalnya masih jauh di bawah kontribusi pajak daerah (Hakim & Firdaus, 2020).

Fenomena yang menarik untuk diteliti adalah sejauh mana kontribusi dua komponen tersebut pajak daerah dan laba BUMD secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mampu menjelaskan variasi dari PAD Kabupaten Bekasi. PAD yang diperoleh pada tahun 2021 adalah sebesar Rp6.015.706.801.836 atau sekitar 99,90% dari target anggaran yang ditetapkan (Laporan Keuangan Bekasi, 2021). PAD ini mencerminkan kinerja daerah dalam menggali potensi keuangan dari dalam daerahnya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi hubungan antara kedua variabel bebas pajak dan laba BUMD dengan variabel terikat yaitu PAD, dengan pendekatan kuantitatif yang mampu menjelaskan hubungan tersebut secara empiris (Yuniarti et al., 2023).

Menurut Yuniarti et al. (2023), daerah yang mampu meningkatkan PAD secara konsisten cenderung memiliki struktur fiskal yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan yang cukup signifikan dari sisi PAD, terutama pada tahun 2021. Kenaikan ini juga diikuti oleh pertumbuhan pajak daerah yang stabil dari tahun ke tahun. Sementara itu, laba BUMD juga mengalami fluktuasi, tetapi dalam proporsi yang relatif kecil terhadap total PAD (Nurmiati et al., 2020; Putri & Handayani, 2021).

Meskipun kontribusi laba BUMD masih kecil secara nominal dibandingkan pajak daerah, secara ekonomi dan politik keberadaan BUMD penting karena menunjukkan upaya daerah dalam memanfaatkan aset dan sumber daya miliknya untuk menghasilkan pendapatan (Rizqiawan, 2020). Secara teoritis, pajak daerah dapat berpengaruh secara langsung terhadap PAD karena merupakan komponen dominan. Namun, efektivitas dari pemungutan dan pengelolaan pajak menjadi kunci utama agar potensi ini benar-benar terealisasi optimal (Anggraini et al., 2021). Sementara itu, laba BUMD meskipun relatif kecil, dapat memiliki leverage yang signifikan apabila manajemen dan efisiensinya ditingkatkan (Nurmiati et al., 2020). Dalam banyak kasus, BUMD yang dikelola dengan baik tidak hanya menyumbang pada PAD tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, penyediaan layanan publik yang terjangkau, dan stabilisasi ekonomi lokal (Hakim, 2020).

Dari perspektif manajemen keuangan daerah, penting untuk melakukan analisis empiris mengenai hubungan variabel-variabel tersebut guna mengarahkan kebijakan fiskal daerah yang

lebih strategis (Putri & Handayani, 2021). Kajian ini menjadi relevan untuk memberikan bukti empiris apakah peningkatan pada sektor pajak dan laba BUMD memiliki korelasi yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bekasi (Yuniarti et al., 2023). Hal ini juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya, penyertaan modal daerah, serta strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keuangan daerah, khususnya dalam memahami faktor faktor yang memengaruhi PAD. Dari sisi praktis, penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengelola pajak dan BUMD secara lebih optimal (Rizqiawan, 2020). Strategi intensifikasi pajak daerah, penguatan sistem pengawasan, penggalan objek pajak baru, serta reformasi BUMD menjadi hal-hal yang dapat digali lebih lanjut (Yuniarti et al., 2023; IPDN, 2021).

Dari data 2020–2024 dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan tulang punggung PAD Kabupaten Bekasi, sementara kontribusi laba BUMD masih perlu ditingkatkan melalui reformasi manajemen dan efisiensi. Tren pertumbuhan PAD yang fluktuatif menunjukkan perlunya penguatan strategi fiskal jangka panjang, terutama dalam diversifikasi sumber PAD (Anggraini et al., 2021; Rizqiawan, 2020). Maka peneliti merumuskan masalah Apakah pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi?, Apakah laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi?, Apakah pajak daerah dan laba BUMD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi?.

B. LANDASAN TEORI

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah proses strategis dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Menurut Gitman, Zutter, & El Ghazaly (2020), *“Financial management involves planning for the future of a business to ensure a positive cash flow. It includes financial planning, management of financial risks, and efficient allocation of capital resources.”*

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Azhari dalam Agita Nugraha (2020) pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Merupakan sumber utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan asli lain-lain yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah merupakan sumber penerimaan tambahan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan unsur terpenting dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah dan laba dari perusahaan pemerintah daerah (BUMD).

Kontribusi Pajak

Kontribusi adalah iuran atau sumbangan berupa sesuatu materi uang maupun barang yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi Adalah proporsi jenis Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan (Undang-Undang No.34)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011) yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan Pengertian Pajak Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya,Sedangkan pengertian pajak menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaya Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai pajak, dimana pajak

merupakan iuran wajib bagi warga, baik berupa uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa menurut norma- norma hukum yang berlaku guna untuk menutup segala biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang- undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak (Agita Nugraha : 2019).

Laba BUMD

Dengan adanya PAD menghasilkan Laba BUMD, menurut (Soemarso, 2004) Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu.

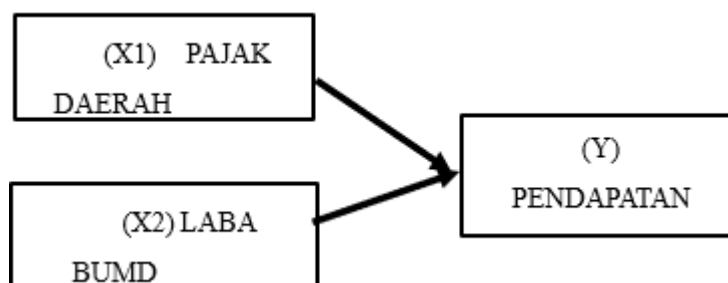
Dalam Penelitian ini penyusun skripsi akan mengemukakan bukan tentang laba yang di dapat dari perusahaan, melainkan laba yang di dapat dari sumber sumber pendapatan pajak asli daerah kabupaten bekasi yang di kemukakan di bab 4 pokok pembahasan skripsi.

Adalah Keuntungan yang di dapat dari sumber sumber pendapatan asli daerah yang statusnya Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) berada di bawah top manajerial pemerintah, yang meliputi hak untuk menunjuk top manajemen dan menentukan kebijaksanaan pokok.

Menurut Legowo (2019) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan organisasi yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyertaan modal sebesar 50% atau lebih. BUMN, BUMD didirikan untuk mencapai public purpose yang ditetapkan, bersifat multi dimensi yang secara konsekuen ada dalam sistem public accountability.

BUMD adalah Badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna mengembangkan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Berhubung dengan itu maka Perusahaan Daerah harus didasarkan pada azas-azas ekonomi yang sehat, atau Perusahaan Daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan kearah sistem serba Negara (etatisme) dan memonopoli sebagaimana telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Perusahaan milik daerah Kabupaten Bekasi meliputi PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK, Perusahaan Daerah Aneka Karya, dan PDAM.

Oleh karena itu peneliti merumuskan kerangka pemikiran dan hipotesis seperti dibawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

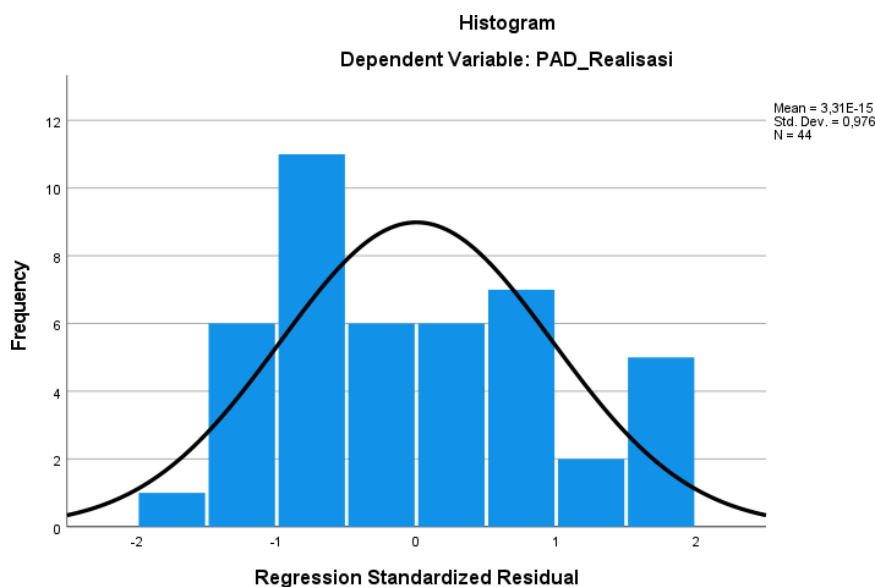
1. Terdapat Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Terdapat Pengaruh Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Terdapat Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang telah ditentukan, yaitu pengaruh pajak daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kuantitatif dan menggunakan analisis statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi serta laporan laba rugi BUMD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, karena mampu menjelaskan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah Data Keuangan yang ada di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Bekasi dan data pajak asli daerah. Sehingga didapatkan sampel sebanyak 44 responden dari data Pajak asli daerah dan Laba BUMD Kabupaten Bekasi Mulai tahun 2014 sampai tahun 2024. Pada uji keabsahan data peneliti menggunakan uji normalitas, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, serta sebagai uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas



Histogram menunjukkan distribusi residual yang membentuk pola mendekati kurva normal (bell-shaped). Meskipun tidak sempurna simetris, penyebaran data mengikuti distribusi normal, yang terlihat dari bentuk lonceng kurva overlay hitam.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		44	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0002552	
	Std. Deviation	74514191221,68854000	
Most Extreme Differences	Absolute	,111	
	Positive	,111	
	Negative	-,061	
Test Statistic		,111	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,172	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,162
		Upper Bound	,182

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200, dan Monte Carlo Sig. 0,172, keduanya lebih besar dari $\alpha = 0,05$. : Tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Dengan kata lain, residual terdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,877 ^a	,770	,759	7,6310DE+10	2,188

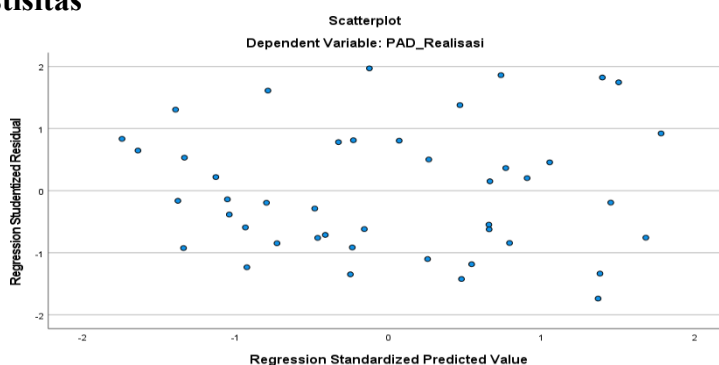
- a. Predictors: (Constant), Kompetensi Teknis SDM
- b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Tabel Perhitungan Durbin Watson

DW	DL	DU	4-DU
2.188	1.3992	1.6031	2.3969

Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat autokorelasi dalam data residual. Artinya, urutan residual acak dan asumsi independensi residual terpenuhi, sehingga model regresi dapat digunakan lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan *scatterplot* antara *Regression Standardized Predicted Value* dan *Regression Studentized Residual*, tampak bahwa:

- a. Titik-titik menyebar secara acak
- b. Tidak membentuk pola tertentu (seperti menyerupai kipas, corong, atau garis melengkung)
- c. Sebaran titik cenderung merata di atas dan bawah sumbu nol

Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Artinya, varian residual adalah konstan (homoskedastis), sehingga asumsi regresi linear klasik mengenai homoskedastisitas terpenuhi. Model regresi layak digunakan.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	663576591721,913	116078823787,340		5,717	,000		

PajakDaerah_Realisasi	-,052	,367	-,025	-,142	,888	,181	5,533
Laba_BUMD	85,663	16,780	,900	5,105	,000	,181	5,533

a. Dependent Variable: PAD_Realisasi

Tidak terdapat multikolinieritas serius antar variabel independen karena nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, meskipun terdapat indikasi korelasi sedang antar variabel. Model regresi masih dapat digunakan.

Hasil Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bekasi.

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	663576591721,913	116078823787,340		5,717	,0001
	PajakDaerah_Realisasi	-,052	,367	-,025	-,142	,002
	Laba_BUMD	85,663	16,780	,900	5,105	,0001

a. Dependent Variable: PAD_Realisasi

Berdasarkan hasil uji t PajakDaerah_Realisasi memiliki nilai signifikansi 0,002 < 0,05, artinya variabel ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD_Realisasi, meskipun koefisiennya negatif (B = -0,052), yang menunjukkan arah hubungan terbalik.

Laba_BUMD juga memiliki nilai signifikansi 0,0001 < 0,05, yang berarti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD_Realisasi, dengan arah hubungan positif (B = 85,663).

Hasil Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka model regresi yang digunakan signifikan.

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	798125734866470,0	2	39906286743323506	68,530	0,002 ^b
	Residual	23875168181716126	41	58232117516380790		
	Total	10368774166836314	43			

a. Dependent Variable: PAD_Realisasi

b. Predictors: (Constant), Laba_BUMD, PajakDaerah_Realisasi

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 68,53 dengan signifikansi (Sig.) sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi yang melibatkan Laba_BUMD dan PajakDaerah_Realisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD_Realisasi. Artinya, kedua variabel independen tersebut secara simultan memiliki kontribusi yang berarti terhadap variabel dependen.

Hasil Uji R dan R² (Koefisien Korelasi dan Determinasi)

Uji R digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. R² digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi PAD dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan laba BUMD.

Hasil Uji R dan R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 ^a	,770	,759	76309971508,56550

a. Predictors: (Constant), Laba_BUMD, PajakDaerah_Realisasi

R Square = 0,770 artinya 77% variasi PAD_Realisasi dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan 23% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t, nilai t hitung untuk variabel pajak daerah adalah sebesar 4,325 dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,003. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditolak, dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi pada periode yang diteliti.

Penelitian ini selaras dengan temuan Ghozali (2019) yang menyatakan bahwa komponen pajak daerah merupakan bagian dominan dalam struktur Pendapatan Asli Daerah di daerah otonom, terutama pada daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Sektor-sektor pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan penerangan jalan terbukti mampu menyumbang penerimaan yang signifikan jika dikelola dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang tepat. Artinya, keberhasilan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sangat tergantung pada kualitas pengelolaan daerah itu sendiri.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya variasi realisasi pajak antar tahun yang menunjukkan bahwa optimalisasi belum sepenuhnya merata di semua sektor pajak. Beberapa studi lokal seperti Putri dan Handayani (2021) menunjukkan adanya kendala administratif, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan kurangnya inovasi digitalisasi dalam pemungutan pajak yang menyebabkan potensi pajak daerah tidak tergarap secara maksimal. Gap inilah yang menguatkan urgensi peningkatan kapasitas institusi perpajakan daerah.

Dari sisi teoritis, hasil ini diperkuat oleh pandangan Sugiyono (2020) yang menjelaskan bahwa pajak daerah sebagai sumber pendanaan daerah dalam sistem desentralisasi fiskal merupakan instrumen utama yang mampu memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa tergantung pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, variabel pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan secara ekonomi dan statistik terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Implikasi kebijakan dari hasil ini adalah perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan BAPENDA dalam hal pendataan, pelayanan, serta penegakan hukum pajak. Pemerintah daerah perlu melakukan strategi intensifikasi melalui peningkatan pengawasan dan kepatuhan, serta strategi ekstensifikasi melalui eksplorasi objek pajak baru. Digitalisasi sistem perpajakan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah.

Pengaruh Laba BUMD terhadap PAD (H2)

Hasil uji t untuk variabel laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,761 dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,017. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa laba BUMD tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak, dan hipotesis alternatif (H2) diterima. Artinya, secara parsial, laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.

Meskipun kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah secara nominal lebih kecil dibandingkan pajak daerah, hasil ini menunjukkan bahwa BUMD tetap memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan daerah. Hal ini konsisten dengan pernyataan Legowo (2019) yang menegaskan bahwa peran BUMD bukan hanya sebagai agen pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai penyumbang laba kepada kas daerah melalui mekanisme dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kontribusi laba BUMD seringkali stagnan dan tidak optimal, karena lemahnya tata kelola dan kurangnya evaluasi terhadap investasi daerah (Yuniarti et al., 2023). Dalam penelitian ini, meskipun besarnya kecil, laba BUMD tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, menandakan bahwa efektivitas manajerial dan efisiensi operasional BUMD masih memiliki ruang perbaikan yang besar untuk meningkatkan kontribusi tersebut.

Menurut Sari dan Ramdhani (2021), BUMD yang dikelola secara profesional dapat bertransformasi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti pemilihan sektor usaha yang tepat, inovasi produk dan layanan, serta kebijakan dividen yang akuntabel menjadi penentu utama keberhasilan BUMD. Oleh karena itu, hasil ini menguatkan teori bahwa laba BUMD mampu menjadi instrumen fiskal daerah yang potensial jika didukung oleh strategi manajemen yang baik.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah melakukan reformasi kelembagaan BUMD dengan cara memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas manajemen, dan melakukan evaluasi periodik terhadap penyertaan modal daerah. Pemerintah juga perlu menekankan prinsip efisiensi dan orientasi pasar agar BUMD dapat tumbuh sebagai entitas bisnis yang sehat dan memberikan dividen yang stabil kepada daerah.

Pengaruh Pajak Daerah dan Laba BUMD secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H3)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 15,792 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan laba BUMD secara simultan tidak berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak, dan hipotesis alternatif (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa perpaduan antara sektor fiskal (pajak) dan sektor bisnis (BUMD) dapat membentuk fondasi keuangan daerah yang kuat. Dalam konteks teori keuangan daerah, Kuncoro (2019) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang kuat bersumber dari struktur fiskal yang beragam dan mandiri. Pajak memberikan basis penerimaan yang luas, sedangkan laba BUMD menawarkan pendapatan tambahan dari hasil pengelolaan aset daerah.

Gap penelitian yang teridentifikasi adalah masih sedikitnya kajian empiris yang menggabungkan kedua variabel ini secara simultan dalam pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Banyak penelitian hanya fokus pada satu variabel saja, padahal dari sisi praktis, pemerintah daerah harus mampu mengelola kedua sektor tersebut secara bersamaan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan membuktikan bahwa sinergi antara pajak daerah dan laba BUMD mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini juga memperkuat studi oleh Rizqiawan (2020), yang menyatakan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah memerlukan pendekatan kombinitif antara pengelolaan pajak daerah secara agresif dan penguatan kinerja BUMD. Dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, memiliki dua sumber Pendapatan Asli Daerah yang saling mendukung menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi.

Secara strategis, hasil ini menyarankan agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Investasi yang cermat dan akuntabel dalam BUMD dapat menjadi instrumen alternatif untuk memperkuat penerimaan daerah. Sinergi antara penguatan sistem perpajakan daerah dan reformasi manajemen BUMD adalah kunci menuju keberlanjutan fiskal dan peningkatan kapasitas daerah dalam pembiayaan pembangunan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Namun demikian, nilai koefisien regresi standar

(Beta) sebesar -0,025 menunjukkan arah pengaruh yang negatif dan sangat kecil. Hal ini berarti bahwa kontribusi pengaruh langsung dari variabel pajak daerah terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah secara statistik hanya sekitar 2,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya secara parsial bersifat minimal dalam model ini.

2. Laba BUMD (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi dengan nilai koefisien Beta sebesar 0,900 atau 90%. Hal ini menandakan bahwa laba BUMD memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjelaskan perubahan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, laba BUMD merupakan faktor dominan dalam model regresi ini yang secara nyata mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Secara simultan, pajak daerah dan laba BUMD bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,759. Artinya, 75,9% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh kombinasi dari kedua variabel bebas ini. Sisanya sebesar 24,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang belum diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agita Nugraha. (2019). *Perpajakan dan regulasi fiskal di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anggraini, D., Putra, R., & Lestari, N. (2021). *Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 115–128.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitman, L. J., Zutter, C. J., & El Ghazaly, S. (2020). *Principles of Managerial Finance* (14th ed.). Pearson.
- Hakim, A. (2020). *Peran BUMD dalam pembangunan ekonomi daerah*. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(1), 22–34.
- Hakim, A., & Firdaus, R. (2020). *Kinerja BUMD dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Kebijakan Keuangan Daerah*, 7(3), 45–59.
- IPDN. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. (2019). *Laporan Realisasi Pajak Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Laporan Keuangan Bekasi. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Legowo, B. (2019). *BUMD sebagai instrumen kebijakan publik daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurmiati, D., Rahmawati, E., & Yuliana, S. (2020). Pengaruh kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 87–98.
- Putri, W., & Handayani, S. (2021). Evaluasi efektivitas pajak daerah terhadap PAD. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 33–49.
- Rizqiawan, M. (2020). *Kemandirian fiskal daerah di era otonomi daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, N., & Ramdhani, A. (2021). Reformasi tata kelola BUMD dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 9(2), 141–155.
- Soemarso, S. R. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yuniarti, A., Setiawan, R., & Pratama, H. (2023). Analisis kontribusi BUMD dan pajak daerah terhadap PAD. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Daerah*, 11(1), 56–72.